

OPEN ACCESS

Citation: Dahiri. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan dan Disparitas Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 138-155

Received: May 4, 2023
Revised: May 30, 2023
Accepted: July 13, 2023
Published: July 2023

© The Author(s)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Artikel

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN DAN DISPARITAS PREVALENSI KETIDAKCUKUPAN KONSUMSI PANGAN

The Effect of Economic Growth and Open Unemployment Rate on Prevalence of Undernourishment and Disparity In Prevalence of Undernourishment

Dahiri¹⁾

¹⁾ Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

email: dahiridai@gmail.com

Abstract

The prevalence of undernourishment is one of the national strategic programs in the 2020–2024 national medium-term development plan, with a target of 5.38 percent in 2024. However, the prevalence of undernourishment during the 2017–2022 period shows an increasing trend amid growth, the economy is improving, and the unemployment rate is falling. The research method used is quantitative research with regression models, ANOVA tests, and Duncan tests. The data used are secondary data, namely economic growth, open unemployment rates, and the prevalence of undernourishment nationally and regionally during the 2017–2022 period. The results showed that economic growth and the open unemployment rate had no significant effect on the prevalence of undernourishment nationally and regionally, and there were significant differences in the prevalence of undernourishment between provinces in Indonesia, thus forming 14 disparity clusters.

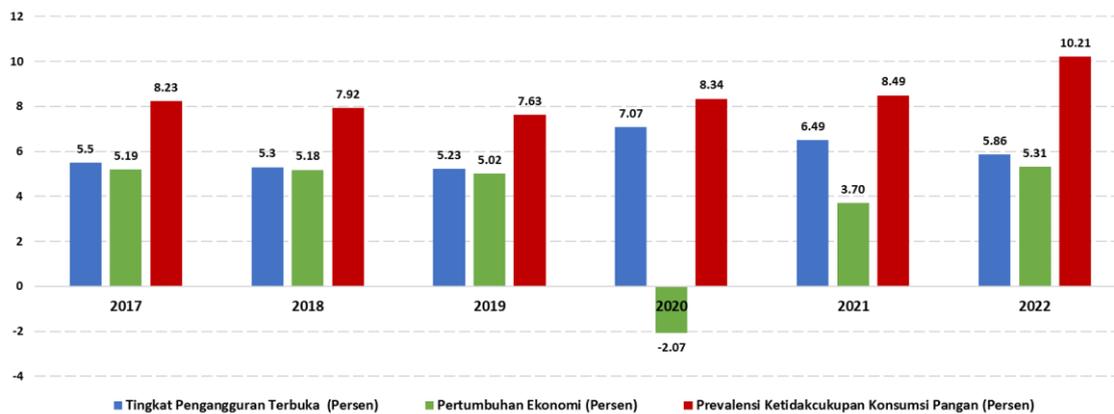
Keywords: *economic growth, prevalence of undernourishment, the unemployment rate.*

JEL Classifications: *C21; I32; I38; J64; O40.*

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2020). Salah satu target yang ingin dicapai dari TPB/SDGs adalah target tanpa kelaparan. Target tersebut merupakan komitmen global dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka Indonesia juga berperan aktif dalam mencapai target tanpa kelaparan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kemudian dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 juga tegas menyatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dengan demikian, jelas bahwa negara harus hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia sebagai upaya mencapai target tanpa kelaparan dari TPB/SDGs, maka pemerintah menjadikan target tanpa kelaparan menjadi program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program tersebut yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Kemudian tolak ukur capaian program prioritas nasional terkait tanpa kelaparan ini yaitu prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (BPS, 2023). Kemudian perkembangan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan selama periode 2017-2022 menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 8,23 persen tahun 2017 menjadi 10,21 persen tahun 2022 (Gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Peningkatan prevalensi ini juga dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 tahun 2020. Pandemi tersebut telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian global dan khususnya perekonomian nasional. Perekonomian nasional yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,07 persen dan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07 persen tahun 2020 dari 5,23 persen tahun 2019. Meskipun pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional, tetapi dalam tiga tahun terakhir perekonomian mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2022 dan tingkat pengangguran mampu turun menjadi 5,86 persen pada tahun 2022 (Gambar 1). Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya tingkat pengangguran terbuka, seharusnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan mengalami penurunan. Namun faktanya tidak demikian, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan justru meningkat terus setiap tahunnya. Berdasarkan kondisi tersebut dan rata-rata penurunan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan sebelum pandemi (periode 2017-2019) hanya turun rata-rata 0,46 persen, maka target prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 5,38 persen di tahun 2024 menjadi tantangan yang sulit untuk dicapai. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan strategi kebijakan yang optimal untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis bermaksud menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti terkait prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Mardison (2020) meneliti mengenai analisa faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat menggunakan GeoDa. Adapun variabel yang digunakan adalah persentase kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat dengan model spasial dan data yang digunakan adalah tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kecukupan gizi masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2018. Sementara itu, variabel persentase kemiskinan kurang berpengaruh. Kemudian Solana (2022) meneliti mengenai analisis spasial faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Indonesia tahun 2020. Variabel yang digunakan adalah pengeluaran per kapita, rata-rata inflasi, produksi beras per kapita, dan realisasi belanja bantuan sosial per kapita dengan model regresi spasial dan data yang digunakan adalah 34 provinsi pada periode waktu tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita, produksi beras per kapita, dan realisasi belanja bantuan sosial pemerintah daerah per

kapita berpengaruh signifikan dalam menurunkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan. Sebaliknya, peningkatan rata-rata inflasi makanan bulanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan.

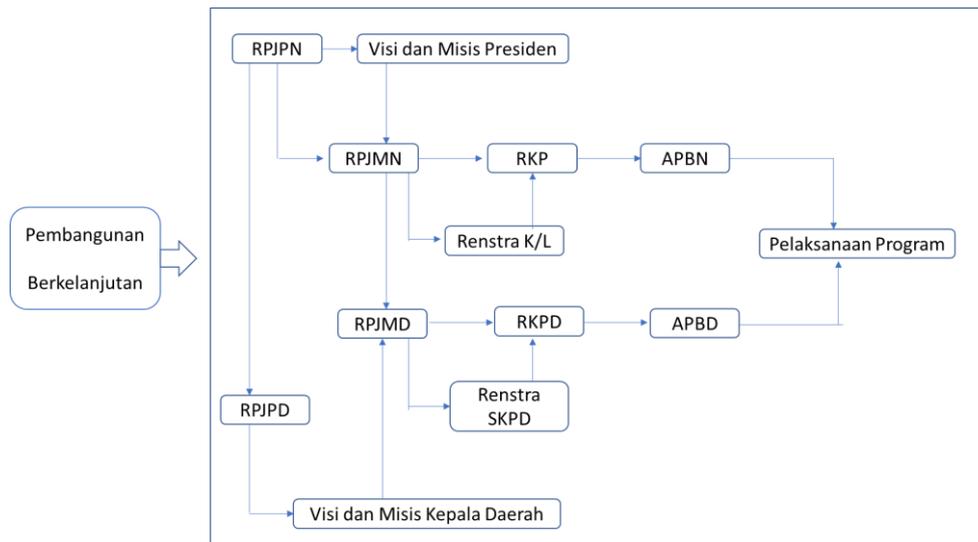
Novelty dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto regional (PDRB), dan tingkat pengangguran terbuka baik secara nasional dan regional selama periode tahun 2017-2022. Adapun uji statistik yang digunakan adalah regresi linear dan ANOVA. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan secara nasional, (2) menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan secara regional, dan (3) menganalisis disparitas prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan antara 34 provinsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan Berkelanjutan

Dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, 5 (lima) tujuan masuk ke dalam dimensi sosial, yaitu kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan gender. Identifikasi awal pada dimensi sosial menunjukkan 19 (sembilan belas) indikator, 6 (enam) indikator kesehatan, 5 (lima) indikator pendidikan dan 3 (tiga) indikator gender. Pembangunan dimensi sosial hampir sebagian besar merupakan kelanjutan dari pembangunan milenium, dengan tujuan utama adalah peningkatan kualitas manusia namun ditambahkan beberapa tujuan baru. Dimensi ini mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesetaraan gender, ditambah beberapa kelompok tujuan baru yang sebenarnya sudah tercakup namun diturunkan menjadi kelompok tujuan tersendiri (Kurniawan et al., 2019).

Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2 (Bappenas, 2020).



Gambar 2. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan
 Sumber: Bappenas, 2020

Salah satu sasaran dari TPB/SDGs yaitu tanpa kelaparan. Kebijakan RPJMN 2020-2024 yang sesuai dengan indikator tanpa kelaparan adalah: (1) meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat; (2) menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik pertanian terutama melalui peningkatan produktivitas dan teknik produksi berkelanjutan; (3) memperkuat komunikasi perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; (4) memperluas penyediaan makanan untuk populasi yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; (5) percepatan pengurangan stunting dengan meningkatkan efektivitas intervensi spesifik dan perluasan dan penajaman intervensi spesifik; (6) intervensi fortifikasi untuk garam dengan yodium, tepung dengan zat besi dan minyak goreng kelapa sawit dengan vitamin A untuk memastikan asupan mikronutrien yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin (Bappenas, 2020).

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tanpa kelaparan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU). Ketidakcukupan konsumsi pangan didefinisikan sebagai kondisi individu yang habitual konsumsi makanan tidak cukup untuk menyediakan, pada rata-rata, jumlah energi makanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup normal, aktif dan sehat. Untuk menghitung estimasi dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada populasi, distribusi probabilitas pola makan kebiasaan tingkat asupan energi (dinyatakan dalam kkal per orang per hari) untuk rata-rata individu dimodelkan sebagai fungsi kepadatan probabilitas parametrik. Kebijakan TPB/SDGs di daerah harus sesuai dengan mandat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD provinsi. Pemerintah kabupaten/kota bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/SDGs tingkat kabupaten/kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan

Rencana Aksi TPB/SDGs. Pembagian kewenangan Rencana Aksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bappenas, 2020).

2. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi yaitu usaha meningkatkan kapasitas produksi bagi capaian keluaran yang terukur dari penggunaan PDB ataupun PDRB pada sebuah daerah. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kegiatan meningkatkan keluaran per kapita jangka panjang. Melalui hal ini bisa diamati aspek dinamika sebuah kegiatan ekonomi, yakni cara sebuah aktivitas ekonomi mengalami perkembangan ataupun perubahan dari masa ke masa. Terdapat sejumlah faktor yang bisa menjadi parameter dalam mengamati pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah yaitu ketidakseimbangan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, dan produk domestik regional bruto. Sedangkan pengangguran adalah persoalan makro ekonomi yang memberikan pengaruh kepada keberlangsungan hidup manusia secara langsung. Pengangguran merupakan topik yang kerap didiskusikan pada debat politik oleh para birokrat yang kerap melakukan kajian bahwasanya kebijakan yang ditawarkannya dapat menjadi solusi dari hadirnya lapangan pekerjaan yang memadai. Kemudian, pengangguran terbuka ialah bagian dari angkatan kerja yang menganggur ataupun tengah mencari lowongan kerja (Dermawan et al., 2022).

3. Pentingnya Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang

Keragaman konsumsi pangan dapat memperbaiki status gizi, mendorong pertumbuhan dengan berat badan yang sehat, dan menumbuhkan gaya hidup sehat. Konsumsi makanan yang sehat dengan asupan yang beragam juga membantu mencegah semua bentuk malnutrisi dan penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Kecukupan zat gizi mikro penting untuk menunjang sistem imun, sehingga mengurangi kemungkinan terjangkit penyakit menular. Pendekatan yang digunakan Indonesia untuk mengukur keragaman konsumsi pangan tercermin dalam Pola Pangan Harapan (PPH). Kemudian menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 28/2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, skor PPH merepresentasikan mutu gizi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia berdasarkan kontribusi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) dibandingkan nilai idealnya. Skor PPH diukur dari sembilan kelompok pangan: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain (Alta et al., 2023).

Adapun skor maksimum yaitu 100, mencerminkan kombinasi ideal antara makanan bergizi dan beragam. Skor PPH nasional telah meningkat dari tahun 2015 hingga 2020, menunjukkan adanya peningkatan dalam keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia. Meski gagal mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN, skor PPH mencapai 86,3 pada tahun 2020 atau naik dari skor 81,5 pada tahun 2015 (Badan Ketahanan Pangan Kementan, 2021). Kendati demikian, konsumsi sejumlah kelompok pangan (sebagai persentase dari AKE) masih belum ideal (Tabel 1). Skor PPH dalam kurun tahun 2015–2020 memperlihatkan bahwa padi-padian berkontribusi secara rerata 59,68 persen terhadap energi per kapita per hari, atau lebih dari tingkat idealnya yaitu 50 persen. Untuk minyak dan lemak berkontribusi 11,76 persen, juga lebih tinggi dari tingkat ideal 10 persen. Adapun kelompok-kelompok pangan yang kontribusinya masih terlalu kecil adalah sumber pangan

hewani (10,55 persen, dari tingkat ideal 12 persen) dan sayur dan buah (4,90 persen, dari tingkat ideal 6 persen) (Alta et al., 2023).

Tabel 1. Kontribusi Pangan Rata-Rata vs Ideal Terhadap Angka Kecukupan Energi Berdasarkan Kelompok Pangan (dalam %)

Kelompok Pangan	Kontribusi rata-rata terhadap angka kecukupan energi (2015-2020)	Kontribusi Ideal terhadap angka kecukupan energi
Padi-padian	59,68	50
Umbi-umbian	2,47	6
Pangan hewan	10,55	12
Minyak dan Lemak	11,77	10
Buah/biji berminyak	1,47	3
Kacang-kacangan	2,78	5
Gula	4,25	5
Sayur dan buah	4,9	6
Lain-lain	2,07	3

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Kementan dalam Alta et al., 2023

Beras mendominasi konsumsi padi-padian masyarakat Indonesia. Pada tahun 2021, konsumsi beras mencapai 13-46 kali lipat dari konsumsi makanan pokok kaya karbohidrat lainnya. Berdasarkan institusinya, konsumsi beras nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga, diikuti oleh konsumsi industri, hotel, restoran, dan jasa (BPS, 2019). Di tahun tersebut, total konsumsi beras naik sebesar 0,56 persen. Konsumsi beras per kapita juga meningkat 3,86 persen (BPS, 2021). Hal ini perlu menjadi perhatian, karena makanan berkalori tinggi seperti nasi putih sebagai sumber utama karbohidrat dapat menyebabkan diabetes, penyakit kardiovaskular, dan obesitas. Pada tahun itu juga, Indonesia memiliki proporsi populasi dengan diabetes terbesar kelima di dunia (Statista, 2021). Federasi Diabetes Internasional (International Diabetes Federation) (2022) memperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia tahun 2021 mencapai 19,46 juta orang atau naik sebesar 167 persen dibandingkan tahun 2011 (7,29 juta orang). Jumlah penderita diabetes ini diperkirakan akan meningkat sebanyak 19,84 persen pada 2030, mencapai total 23,33 juta orang (Alta et al., 2023).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan terdiri dari data pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan baik secara nasional dan regional di Indonesia selama periode tahun 2017-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah model regresi linear dengan persamaan yaitu:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Adapun Y adalah sebagai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan secara nasional, X_1 adalah pertumbuhan ekonomi, dan X_2 adalah tingkat pengangguran terbuka.

Kemudian disparitas prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dianalisis menggunakan metode uji ANOVA dan *Post-Hoc Test* Duncan. Analisis data yang telah dilakukan akan menghasilkan kesimpulan apakah H_0 atau H_1 yang diterima setelah dilakukan uji F (ANOVA) dengan rumus (Indriyani et al., 2020):

$$X_{ij} = \mu + R_i + C_j + (R_i C_j) + e_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hipotesis yaitu:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 \dots\dots = \mu_n$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4 \dots\dots \neq \mu_n$$

atau sekurang-kurangnya ada sepasang yang tidak sama.

Jika hasil analisis yang didapat adalah tolak H_0 , maka analisis akan dilanjutkan dengan pengujian beda nilai rata-rata (pengujian lanjut). Metode pengujian beda nilai rata-rata yang digunakan adalah metode *Duncan Multiple Range Test* (DMRT). Uji DMRT didasarkan pada sekumpulan nilai beda nyata yang ukurannya semakin besar, tergantung pada jarak di antara pangkat-pangkat dari dua nilai tengah yang dibandingkan (Djidi et al., 2016).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Secara Nasional

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan secara nasional dianalisis menggunakan model regresi dengan software EViews 10. Untuk mendapatkan model yang *Best Linear Unbiased Estimators* (BLUE), maka model regresi dilakukan uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil uji Jarque-Bera diperoleh bahwa Jarque-Bera=0,59 dan probabilitas Jarque-Bera=0,74. Karena nilai Jarque-Bera < 2 dan probabilitas Jarque-Bera > 0,05, maka model regresi berdistribusi normal.

2) Uji Otokorelasi

Uji otokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji diperoleh bahwa nilai Durbin-Watson=1,76. Model dikatakan tidak ada otokorelasi apabila nilai Durbin-Watson antara 1,54–2,46, maka dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi otokorelasi pada model regresi.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menggunakan uji *correlation* yang hasilnya diperoleh adalah 0,86. Dengan demikian, model mengalami multikolinearitas. Dikarenakan model terjadi multikolinearitas, maka data dari masing-masing variabel ditransformasi menggunakan logaritma natural.

4) Uji Heteroskedastisitas

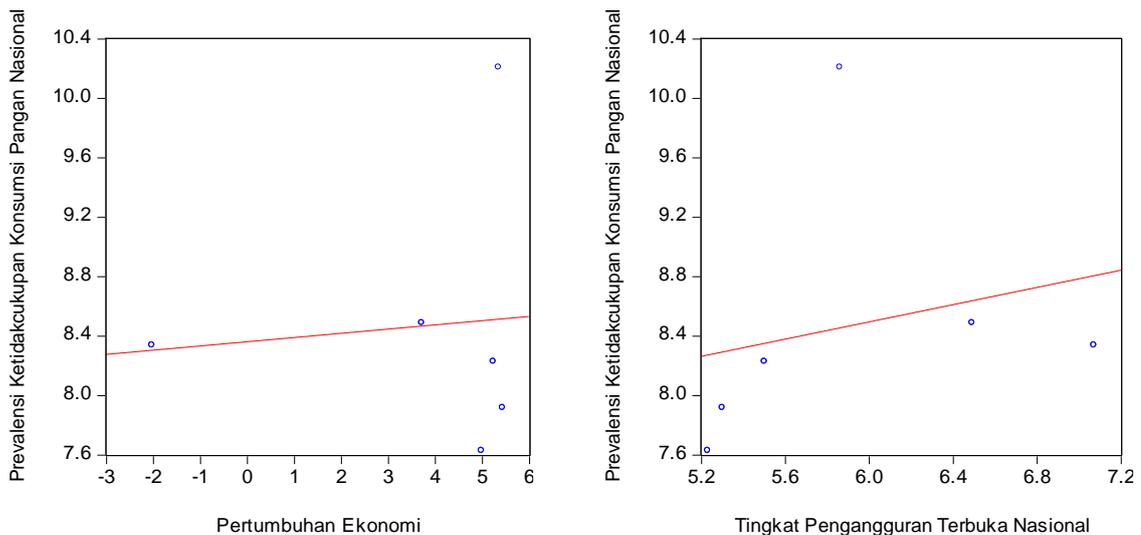
Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Breusch Pagan Godfrey. Dari hasil uji diperoleh probabilitas=0,233 > 0,05, maka model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh hasil model regresi yang bersifat BLUE sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Variabel	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
	$R^2 = 0,9026$
	$n = 18$
Pertumbuhan Ekonomi	$F = 0,097$
	$P = 0,0679$
	$\beta = 0,98$
	$P = 0,0502$
Tingkat Pengangguran Terbuka	$\beta = 2,04$

Sumber: Penulis, hasil analisis data.



Gambar 3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Sumber: Penulis, hasil analisis data

Dari Tabel 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ($P > 0,05$) dan probabilitas $F = 0,097 > 0,05$.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Secara Regional

Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan secara regional dianalisis menggunakan model regresi dengan software EViews 10. Untuk mendapatkan model yang *Best Linear Unbiased Estimators* (BLUE), maka model regresi dilakukan uji asumsi klasik yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera. Hasil uji Jarque-Bera diperoleh bahwa Jarque-Bera=146,73 dan probability Jarque-Bera=0,000. Karena nilai Jarque-Bera > 2 dan probability Jarque-Bera < 0,05, maka model regresi tidak berdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka data variabel ditransformasi menggunakan logaritma natural, kecuali pertumbuhan ekonomi regional.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Disparitas Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

2) Uji Otokorelasi

Uji otokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji diperoleh bahwa nilai Durbin-Watson=1,760741. Model dikatakan tidak ada otokorelasi apabila nilai Durbin-Watson antara 1,54–2,46, maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi otokorelasi pada model regresi.

3) Uji Multikolinearitas

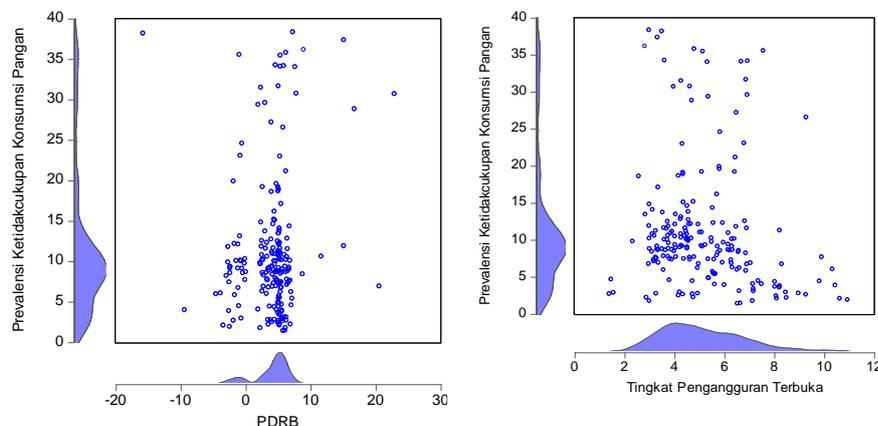
Uji multikolinearitas menggunakan uji correlation dengan hasil yang diperoleh adalah -0,24. Dengan demikian, model tidak mengalami multikolinearitas.

Berdasarkan hasil asumsi di atas diperoleh hasil model regresi yang bersifat BLUE dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Variabel	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan $R^2 = 0,928$ $n = 204$ $F = 0,000$
PDRB	$P = 0,1262$ $\beta = -0,014$
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional	$P = 0,2258$ $\beta = 0,17$

Sumber: Penulis, hasil analisis data.



Gambar 4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Sumber: Penulis, hasil analisis data.

Dari Tabel 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat pengangguran terbuka regional tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan karena masing-masing variabel memiliki nilai $P > 0,05$.

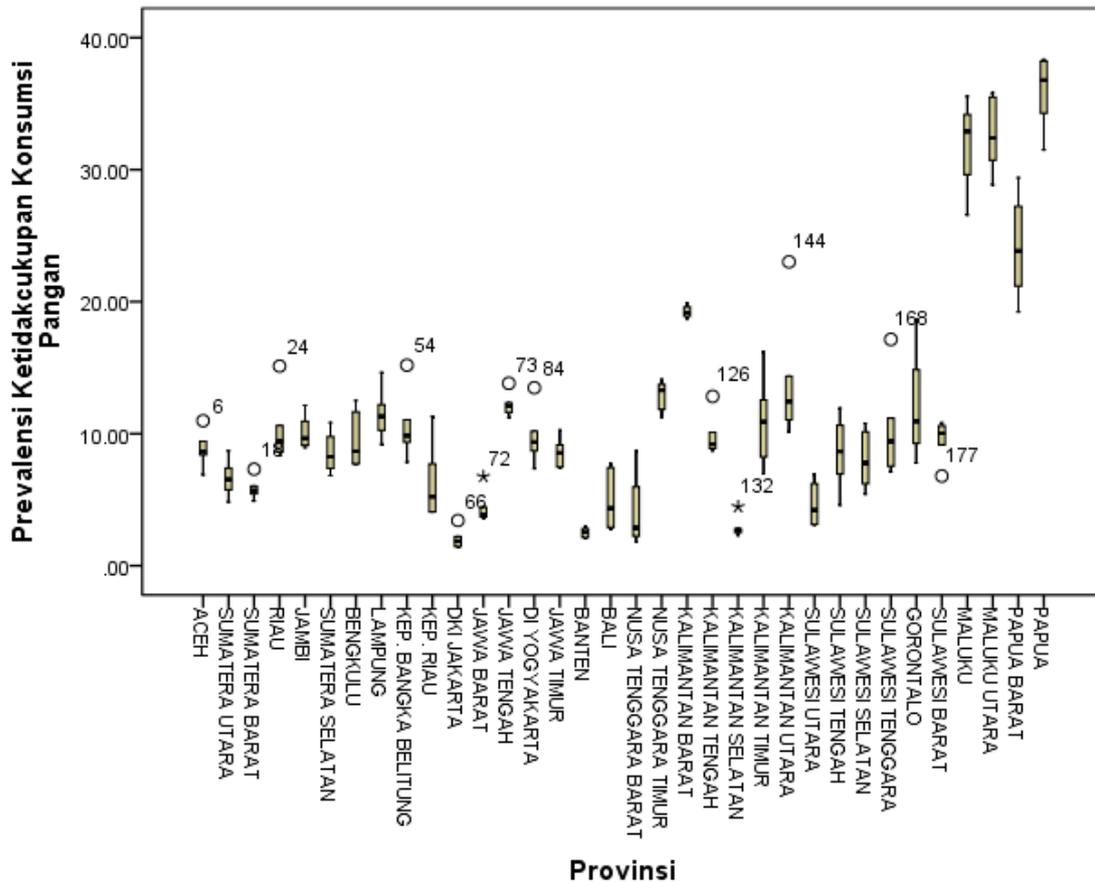
c. Analisis Disparitas Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Antar 34 Provinsi

Dari Tabel 4 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang signifikan antarprovinsi di Indonesia. Kemudian uji lanjutan dilakukan menggunakan uji Duncan dengan hasil dalam Tabel 5.

Tabel 4. Uji Anova Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	13667.817	33	414.176	77.478	.000
Within Groups	908.772	170	5.346		
Total	14576.589	203			

Sumber: Penulis, hasil analisis data.



Gambar 5. Uji Anova Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Sumber: Penulis, hasil analisis data

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 14 kelompok (kluster) tingkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, prevalensi tertinggi pada kluster 14 (Papua) rata-rata 35,98 persen dan terendah pada kluster 1 (DKI Jakarta dan Banten) rata-rata 4,56 persen.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Disparitas Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Tabel 5. Uji Duncan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Regional	N	Kelompok (Kluster)													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DKI JAKARTA	6	2.0417													
BANTEN	6	2.5150													
KALIMANTAN SELATAN	6		2.9067												
NUSA TENGGARA BARAT	6			4.0733											
JAWA BARAT	6			4.3683											
SULAWESI UTARA	6			4.6333											
BALI	6			4.9150											
SUMATERA BARAT	6				5.8450										
KEP. RIAU	6				6.2717										
SUMATERA UTARA	6					6.6233									
SULAWESI SELATAN	6						8.0267								
SUMATERA SELATAN	6							8.5517							
JAWA TIMUR	6							8.5617							
SULAWESI TENGAH	6							8.5650							
ACEH	6							8.8250							
BENGKULU	6								9.4833						
SULAWESI BARAT	6								9.5667						
DI YOGYAKARTA	6								9.7417						
KALIMANTAN TENGAH	6									9.8217					
JAMBI	6									10.0750					
RIAU	6									10.2467					
SULAWESI TENGGARA	6									10.3050					
KEP. BANGKA BELITUNG	6									10.5200					
KALIMANTAN TIMUR	6										10.9583				
LAMPUNG	6										11.4817				
GORONTALO	6										12.0667				
JAWA TENGAH	6										12.1883				
NUSA TENGGARA TIMUR	6										12.9217				
KALIMANTAN UTARA	6										13.8983				
KALIMANTAN BARAT	6											19.2383			
PAPUA BARAT	6												24.1133		
MALUKU	6													31.9517	
MALUKU UTARA	6													32.6100	
PAPUA	6														35.9783

Sumber: Penulis, hasil analisis data.

2. Pembahasan

Dari Tabel 2, Tabel 3, Gambar 3, dan Gambar 4 diperoleh kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dan regional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ($P > 0,05$). Padahal prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) merupakan salah satu program strategis nasional dalam RPJMN 2020-2024. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ditargetkan menjadi 5,38 persen pada tahun 2024. Namun, pasca pandemi Covid-19 prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan tren peningkatan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang dapat tumbuh baik dan turunnya tingkat pengangguran terbuka. Seharusnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan juga turun. Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh turunnya konsumsi rumah tangga. Menurut data BPS, konsumsi rumah tangga turun dari 57,63 persen tahun 2020 menjadi 51,87 persen tahun 2022. Turunnya konsumsi rumah tangga ini sangat dipengaruhi oleh variabel makanan dan minuman. Hal tersebut dikarenakan distribusi kontribusi makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar dengan rata-rata 22,28 persen selama periode 2017-2022 dibandingkan sub variabel lainnya (Gambar 6). Kontribusi makanan dan minuman tersebut mengalami penurunan dari 23,8 persen tahun 2020 menjadi 21,3 persen tahun 2022 (Gambar 6).

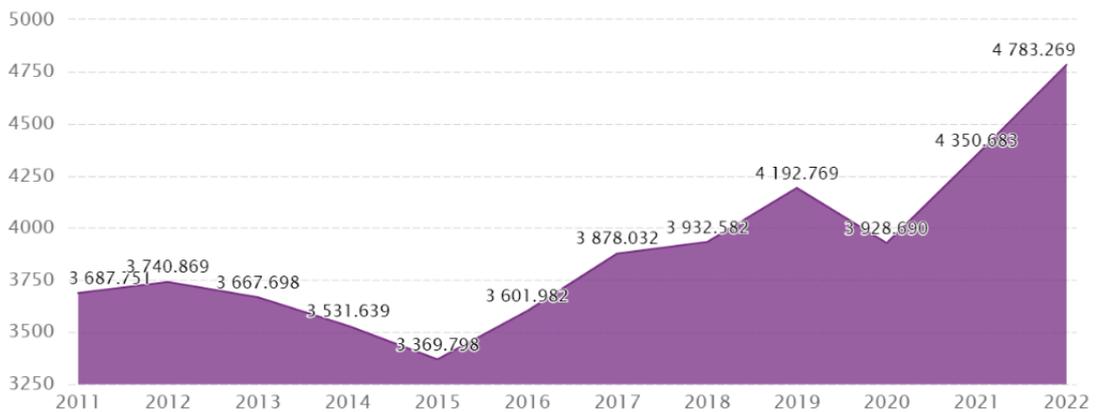


Gambar 6. Distribusi Variabel Pembentuk Konsumsi Rumah Tangga dan Variabel Makanan dan Minuman

Sumber: Penulis, hasil analisis data

Konsumsi ini sangat dipengaruhi dari pendapatan masyarakat atau pendapatan per kapita. Dengan meningkatnya pendapatan, maka masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang khususnya kebutuhan pokok yaitu makanan dan minuman. Artinya peningkatan pendapatan akan mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Apabila peningkatan pendapatan per kapita sebesar satu persen, maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat sebesar 0,31 persen (Juliprijanto *et al.*, 2020).

Namun faktanya tidak demikian, meskipun pendapatan per kapita yang tercermin dari PDB per kapita mengalami tren peningkatan, tetapi faktanya penurunan konsumsi tetap terjadi. Bahkan PDB per kapita tahun 2022 tertinggi selama periode 2011-2022, dengan PDB per kapita sebesar USD4.783,27 (Gambar 7).



Gambar 7. PDB Per Kapita Indonesia 2011-2022

Sumber: www.ceicdata.com.

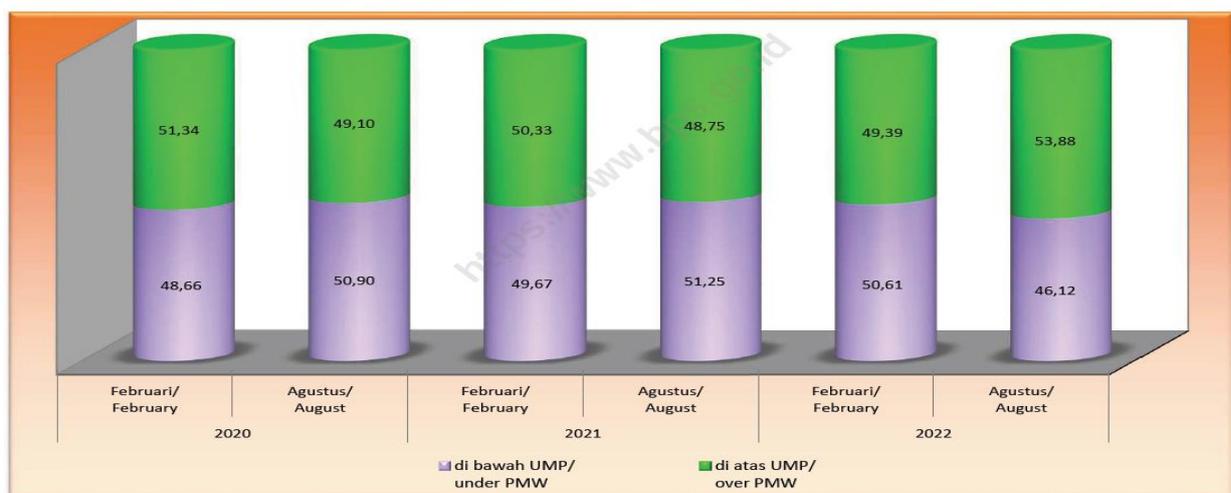
Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut tergerus oleh meningkatnya harga barang yang dibutuhkan yang tercermin dari inflasi. Menurut data BPS, inflasi makanan dan minuman selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 3,63 persen tahun 2020 menjadi 5,83 persen tahun 2022. Apabila peningkatan inflasi sebesar satu persen maka akan menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,49 persen (Efendi, 2020). Dengan meningkatnya inflasi ini, maka potensi kecukupan gizi akan diabaikan. Rata-rata penurunan Tingkat Kecukupan Gizi (TKG) untuk sumber energi dan protein menurun sebesar 10,33 persen dan 17 persen. Masyarakat lebih banyak menurunkan kualitas gizi sumber protein dari pada sumber karbohidratnya. Rata-rata penurunan tingkat kecukupan gizinya mencapai 13,67 persen (Hapsari *et al.*, 2021). Bahkan lebih mirisnya adalah masyarakat khususnya masyarakat miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Disparitas Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Adapun rata-rata kebutuhan pangan keluarga miskin sebesar 1961,70 kkal/individu/hari. Namun, mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarganya sebesar 1261,41 kkal/individu/hari (sebelum pandemi) dan 1131,09 kkal/individu/hari (saat pandemi). Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum mampu mencukupi kebutuhan pangan yang dianjurkan baik sebelum dan saat pandemi akibat ketersediaan kasnya yang tidak cukup untuk memperoleh sejumlah bahan pangan yang dibutuhkan (Hapsari *et al.*, 2021).

Selanjutnya berdasarkan Tabel 2, Tabel 3, Gambar 3, dan Gambar 4 juga diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengangguran terbuka secara nasional dan regional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ($P > 0,05$). Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan, tetapi prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tidak mengalami penurunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja mengalami peningkatan, tetapi hasil upah dari bekerja tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan penghasilan yang layak. Namun, penghasilan yang layak ini sangat bergantung pada tingkat pendidikan pekerja. Artinya pendapatan dan pendidikan memiliki hubungan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pendapatan dan pendidikan kepala rumah tangga berhubungan signifikan dengan status ketahanan pangan ($p < 0,05$). Rumah tangga dengan pendapatan di atas Upah Minimum Kota (UMK sebesar Rp2.848.203) lebih tahan pangan dibandingkan dengan rumah tangga dengan pendapatan di bawah UMK. Sedangkan rumah tangga dengan pendidikan kepala rumah tangga di atas SMP/ sederajat lebih tahan pangan dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya berpendidikan hanya tamat SMP/ sederajat atau lebih rendah (Hafid *et al.*, 2022). Dengan demikian, diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan sesuai dengan UMK merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tentunya UMK atau upah minimum provinsi (UMP) telah memperhitungkan untuk memenuhi standar kehidupan yang layak khususnya kebutuhan akses pangan.

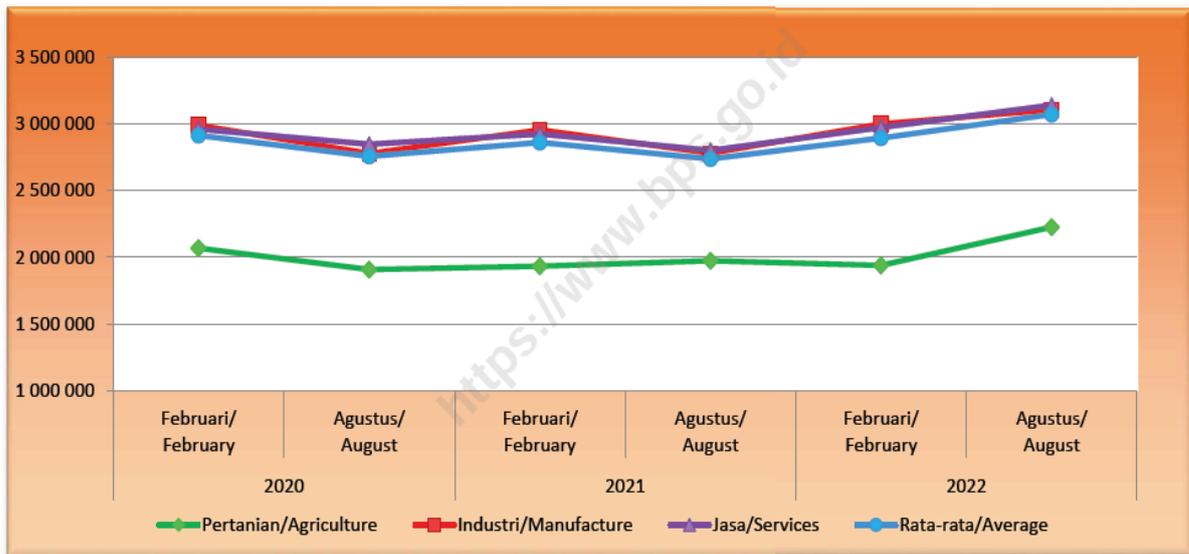
Namun faktanya, pendapatan pekerja di bawah UMP masih besar yaitu 46,12 persen per tahun 2022. Meskipun pendapatan pekerja di bawah UMP mengalami penurunan dari 50,90 persen tahun 2020 menjadi 46,16 persen tahun 2022 (Gambar 8), tetapi penghasilan pekerja tergerus dengan inflasi.



Gambar 8. Perbandingan Penghasilan di bawah UMP dan di atas UMP

Sumber: BPS

Sedangkan rata-rata penghasilan pekerja hanya sebesar Rp3.174.600 per tahun 2022. Bahkan pekerja di sektor pertanian selalu di bawah rata-rata (Gambar 9). Sedangkan menurut data BPS tahunan 2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar Rp665.757 dan bukan makanan sebesar Rp662.025



Gambar 9. Perbandingan Penghasilan Menurut Jenis Pekerjaan

Sumber: BPS

Dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan sebesar Rp665.757 dan keluarga memiliki 2 orang anak, maka penghasilan yang dibutuhkan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sebesar Rp2.663.028. Sehingga pekerja di sektor pertanian tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, karena penghasilan petani di bawah Rp2.500.000. Sedangkan pekerja lainnya masih memiliki sisa sebesar Rp511.572 (asumsi rata-rata penghasilan Rp3.174.600 per tahun 2022). Namun, sisa penghasilan sebesar Rp511.572 untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan juga masih kurang. Apalagi masyarakat di perkotaan, kebutuhan bukan makanannya lebih besar, seperti kebutuhan untuk tempat tinggal rata-rata mencapai Rp450.378 (belum termasuk pendidikan dan kesehatan). Hal ini juga menyebabkan masyarakat miskin perkotaan mungkin lebih rentan tidak tahan pangan dibandingkan masyarakat miskin perdesaan. Kondisi tersebut menjadi penyebab masyarakat menurunkan kualitas gizi sumber protein dari pada sumber karbohidratnya demi untuk memenuhi tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Kondisi yang dijelaskan di atas belum lagi memperhitungkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja tidak penuh. Tentunya penghasilan mereka akan semakin kecil dibandingkan rata-rata penghasilan di atas. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja tidak penuh dan menganggur lebih cenderung untuk mengalami rawan pangan daripada yang bekerja penuh. Di sisi lain, kecenderungan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bukan angkatan kerja adalah 1,2526 kali kecenderungan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bekerja penuh (Yunita, 2021). Dengan demikian, masyarakat akan berpikir untuk kenyang dari pada memikirkan kebutuhan asupan gizi seimbang. Dampaknya masyarakat lebih meningkatkan konsumsi karbohidrat yang tinggi. Padahal meningkatnya konsumsi beras per kapita cukup mengkhawatirkan karena nasi putih sebagai sumber utama karbohidrat dapat menyebabkan diabetes, penyakit kardiovaskular, dan obesitas (Alta et al., 2023). Selain itu, uji bivariat hubungan status ketahanan pangan dengan

status gizi balita menunjukkan ada hubungan antara status *stunted* (pendek) dengan ketahanan pangan rumah tangga ($p < 0,05$). Rumah tangga tahan pangan cenderung memiliki anak yang tidak *stunted* dibandingkan dengan rumah tangga yang rawan pangan (Hafid et al., 2022). *Stunted* ini tentunya akan merugikan Indonesia di masa yang akan datang.

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi masyarakat juga dilakukan dengan memberikan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, program BPNT masih terjadi kendala dalam hal kualitas pangannya. Seperti penyaluran BPNT di Kota Yogyakarta, penerima meminta untuk kualitas beras yang disediakan Perum Bulog perlu ditingkatkan (Izzaty et al., 2021). Padahal kualitas pangan menjadi penting karena hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsi. Artinya, pangan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti cemaran pestisida, logam berat, mikroba patogen ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu kepercayaan ataupun keyakinan masyarakat misalnya tercemar bahan yang berbahaya (Asmiah et al., 2021). Sementara itu, pemerintah daerah juga masih mengalami kendala dalam meningkatkan produksi pangan. Seperti petani sebagai produsen di Minahasa Selatan kesulitan dalam mengakses sarana prasarana seperti pupuk, bibit dan lahan garapan (Nayoan et al., 2021). Selain itu, masalah stabilitas harga produksi pertanian yang tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran (Nayoan et al., 2021).

Kemudian berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 5 diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang signifikan antara provinsi di Indonesia. Untuk mengetahui daerah mana yang memiliki perbedaan, maka peneliti melakukan uji lanjutan dengan Uji Duncan seperti disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antarprovinsi yang dibagi dalam 14 (empat belas) kluster. Kluster 1 (satu) merupakan daerah dengan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan terendah dengan rata-rata 4,56 persen. Sedangkan kluster 14 (empat belas) merupakan daerah dengan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tertinggi dengan angka 35,97 persen. Untuk daerah yang berada dalam kluster yang sama merupakan daerah yang tidak terdapat perbedaan yang signifikan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangannya. Seperti kluster 8 (delapan). Pada kluster 8 (delapan) terdiri dari tiga daerah yaitu Bengkulu, Sulawesi Barat, dan DI Yogyakarta. Meskipun tingkat prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan masing-masing berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak signifikan. Dengan kata lain, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ketiga daerah tersebut memiliki kesamaan. Kluster ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Pertimbangan tersebut dengan memprioritaskan dari kluster 14 (empat belas) yang memiliki prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tertinggi hingga kluster 1 (satu) dengan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan terendah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ($P > 0,05$). Kondisi ini terjadi dikarenakan peningkatan pendapatan per kapita tergerus oleh tingginya inflasi khususnya makanan dan minuman. Kedua, pertumbuhan ekonomi regional dan tingkat pengangguran terbuka regional tidak berpengaruh signifikan terhadap prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ($P > 0,05$). Selain penghasilan tergerus oleh inflasi makanan dan minuman,

kondisi ini terjadi dikarenakan masih banyaknya pendapatan pekerja di bawah UMP yaitu sebesar 46,12 persen. Ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang signifikan antara provinsi di Indonesia, sehingga terbentuk 14 kluster disparitas.

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut yaitu pertama, pemerintah harus menjaga stabilitas inflasi khususnya makanan dan minuman melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan, seperti pada triwulan 2023 terjadi inflasi komoditas beras. Hal ini dikarenakan produksi belum mampu menyuplai kebutuhan domestik. Meskipun secara agregat total produksi mampu memenuhi, tetapi kebutuhan terhadap beras terjadi setiap bulannya. Untuk itu, pemerintah perlu mengatur waktu produksi sehingga produksi dapat berkelanjutan. Kedua, pemberian bantuan kepada masyarakat oleh pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan tingkat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam kluster yang telah dianalisa dan dijelaskan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Alta, Aditya *et al.* (2023). *Hambatan dalam Mewujudkan Konsumsi Pangan yang Lebih Sehat: Kasus Kebijakan Perdagangan dan Pertanian*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- Asmiah *et al.* (2021). *Kajian Pengembangan Keamanan dan Ketahanan Pangan Untuk Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga di Desa Maritengngae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*. *Jurnal Serambi Sehat*, 14(3), 50.
- Bappenas. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Bappenas.
- BPS. (2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2 Tanpa Kelaparan. Metadata Indikator. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1473/sdgs_2/1#:~:text=Prevalensi%20ketidakcukupan%20konsumsi%20pangan%20atau,sehat%2C%20yang%20dinyatakan%20dalam%20bentuk
- Dermawan *et al.* (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia*. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen*, 1(1), 190-198.
- Djidiin *et al.* (2016). *Penilaian Cara Mengajar Menggunakan Rancangan Acak Lengkap*. *Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 10(1), 10-13.
- Efendi, Zakaria *et al.* (2020). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Konsumsi Masyarakat di Kota Magelang*. *Directory Journal of Economic*, 2(3), 816.
- Hafid, Fahmi *et al.* (2022). *Ketahanan Pangan dan Gizi Rumah Tangga Penyintas Bencana Pasca 4 Tahun Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu*. *Jurnal Gizi Dan Kesehatan*, 6(2), 181-185.
- Hapsari, Hepi *et al.* (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Miskin Perkotaan: Studi Kasus Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung*. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(2), 1564-1568.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan dan Disparitas Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

- Indriyani *et al.*. (2020). Bagaimana Kreativitas Dan Keaktifan Mahasiswa Mempengaruhi Pemahaman Materi Abstrak Matematika Melalui E-Learning. *Al Khawarizmi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika*, 4(2), 118.
- Izzaty *et al.*. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 12(2), 141.
- Juliprijanto, Whinarko *et al.*. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Simpanan Dan Nilai Tukar Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia Tahun 2000-2018. *Directory Journal of Economic*, 2(1), 57.
- Kurniawan, Andri *et al.*. (2019). Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 65-66.
- Mardison, Eri. (2020). Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Sumatera Barat Menggunakan GeoDa. *Jurnal Riset Gizi*, 8(1), 65-66.
- Nayoan, Herman *et al.*. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 1(1), 9.
- Solana, Aryadi. (2022). Analisis Spasial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Indonesia Tahun 2020. Paper dipublikasikan dalam Seminar Nasional Official Statistics 2022.
- Yunita, Hepi. (2021). Status Bekerja, Struktur Keluarga dan Kerawanan Pangan Rumah Tangga Dengan Anak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 8(1), 14-16.